

Judul : Tampilkan tumpukan uang sitaan, penegak hukum junjung transparansi
Tanggal : Sabtu, 03 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Tampilkan Tumpukan Uang Sitaan, Penegak Hukum Junjung Transparansi

Fenomena tumpukan uang ratusan miliar yang diperlihatkan lembaga penegak hukum menjadi perbincangan. Di satu sisi, langkah itu dinilai bentuk transparansi, namun ada juga kritik atas tindakan menampilkan uang tersebut.

Terbaru, Satuan Tugas Penelitian Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana sebesar Rp6.625.294.190.469,74 kepada negara pada Rabu (24/12/2025). Dana tersebut berasal dari denda pelanggaran lahan sawit ilegal, tambang nikel ilegal, serta kasus korupsi timah. Tumpukan uang itu ditampilkan di Gedung Jampidsud, Kejaksaan Agung, Jakarta.

Praktik serupa sebelumnya juga pernah dilakukan Kejaksaan, tepatnya

pada 17 Juni 2025. Kejaksaan memerankan uang titipan kasus korupsi ekspor CPO senilai Rp 2 triliun, bagian dari total Rp 11,8 triliun aset yang diamankan. Pada 20 Oktober 2025, Kejaksaan kembali menampilkan sebagian dari Rp 13,2 triliun uang negara yang diserahkan terkait kasus CPO.

Uang pecahan Rp 100.000 ditumpuk hingga setinggi sekitar dua meter di Lobi Utama Kejaksaan.

"Tidak mungkin kami hadirkan semua, kalau Rp 13 triliun, mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar Rp 2,3 triliun," ujar Jaksa Agung Sanitair Burhanudin.

Tak hanya Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga

memamerkan rampasan senilai Rp 300 miliar dari kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero), pada Kamis (20/11/2025). Uang tersebut merupakan bagian dari total Rp 883 miliar yang dirampas dari eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto.

Vonis terhadap Eki telah berkekuatan hukum tetap sehingga perampasan dilakukan sesuai putusan hakim. "Ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik sehingga masyarakat bisa betul-betul melihat barang rampasannya," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (21/11/2025).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menilai,

langkah aparat penegak hukum yang mulai rutin memamerkan tumpukan uang sitaan hasil korupsi dinilai sebagai terobosan positif dalam transparansi perkara. Pola baru ini, lanjut dia, jauh lebih bermakna bagi publik dibandingkan sekadar mempertontonkan tersangka mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol.

"Semangat pemberantasan korupsi harus bergeser dari sekadar penghukuman badan menuju pemulihan kerugian negara atau asset recovery," ujar Rudianto Lallo kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (1/1/2026).

Sementara itu, Mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar menilai, aksi memamerkan tumpukan uang sitaan ke publik belum mencerminkan

keberhasilan sejati dalam pemulihan kerugian negara. Pasalnya, kata dia, jumlah uang yang dikembalikan tersebut seringkali masih sangat timpang jika dibandingkan dengan total nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan koruptor.

"Publikasi itu sebenarnya dilakukan secara komprehensif, jangan hanya pamer angka tanpa ada pembandingnya," ujar Haryono Umar yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Umum Institut Perbanas kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (1/1/2026).

Untuk mengetahui pandangan Rudianto Lallo dan Haryono Umar mengenai langkah penegak hukum memamerkan uang sitaan ke publik, berikut wawancaranya.

RUDIANTO LALLO, Anggota Komisi III DPR

Kalau Dimiskinkan Lebih Menakutkan



Belakangan ini penegak hukum sering memamerkan tumpukan uang sitaan korupsi atau kasus lain di depan media. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?

Kalau saya melihatnya ini adalah pola baru yang jauh lebih bermakna dan jauh lebih baik ketimbang sekadar memamerkan tersangka. Selama ini, sejak reformasi sampai hari ini, pemberantasan korupsi seolah tidak tuntas-tuntas meski segala cara sudah dipakai, seperti menampilkan tersangka dengan rompi oranye dan tangan terborgol. Ternyata, itu tidak memberi efek, jera yang maksimal.

Apa nilai positif dari tindakan memamerkan uang hasil sitaan tersebut kepada publik?

Ada dua hal utama. Pertama, secara sosial normatif ini adalah bagian dari akuntabilitas dan transparansi. Kedua, ini bisa mencegah pikiran negatif masyarakat soal hilangnya barang bukti atau barang sitaan yang selama ini sering terjadi. Dengan ditampilkan, masyarakat tahu bahwa barang bukti itu benar-benar ada dan jumlahnya jelas.

Selain itu, apa yang ingin disampaikan dengan keterbukaan informasi barang sitaan ini?

Ternyata ini bagian dari kewajiban

pejabat publik untuk terbuka memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait barang sitaan, barang rampasan, atau uang pengganti yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penegakan hukum tidak boleh hanya fokus pada penghukuman badan (penjara), tapi yang utama adalah bagaimana pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara.

Kenapa Anda menekankan bahwa pemulihan aset lebih penting dari pada sekadar menjerakan orang?

Seperti yang kita lihat kembali untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya, dipakai untuk penangan bencana atau membangun rumah huni bagi rakyat. Itu jauh lebih nampak hasilnya. Apalagi konsep KUPP baru kita sudah bergeser dari sita terbit (penfidejuran) ke arah restoratif atau pemulihan. Ada kategori kejahatan yang cukup diselesaikan dengan denda atau kerja sosial.

Meningat jumlah uang yang dipamerkan sangat besar, bagaimana pengawasannya agar uang tersebut benar-benar masuk ke kas negara?

Justru dengan ditampilkannya uang itu ke publik, itu sudah merupakan bagian dari pengawasan. Publik tahu jumlahnya sekian, jika tidak ditampil-

kan, justru berbahaya karena sulit diawasi. Selain itu, antar instansi akan saling mengawasi saat menyeterorkannya ke negara melalui Kementerian Keuangan. Medialkan banyak instansi akan menciptakan saling kontrol.

Apakah pendekatan pamer uang sitaan ini efektif memberikan efek jera bagi para koruptor?

Saya yakin akan lebih efektif jika fokus pada pengembalian kerugian negara melalui pasal-pasal TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). hukuman badan selama ini sering dikompromisi dengan remisi tiap tahun, sehingga pelaku merasa lebih siap menjalani penjara. Tapi kalau dimiskinkan, itu jauh lebih menakutkan bagi mereka.

Berarti Anda setuju bahwa memiskinkan koruptor adalah jalan terbaik pemberantasan korupsi?

Betul. Apalagi kita sering mendengar adanya perlakuan istimewa di mana fasilitasnya berbeda dengan kejahatan biasa. Kecenderungannya, orang lebih pilih diumumkan badan ketimbang hartanya dirampas. Jadi, merampas aset mereka jauh lebih efektif untuk memberikan efek jera yang nyata. ■ **www**

HARYONO UMAR, Mantan Wakil Ketua KPK

Jangan Ada Selisih Besar Tak Dijelaskan



Penegak hukum belakangan gencar memamerkan uang sitaan korupsi yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Apa tanggapan Anda?

Memang sudah bagus ada pengembalian ke keuangan negara. Hanya saja, jumlah tersebut masih terlalu sedikit dibandingkan dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi tersebut. Harusnya penegak hukum transparan, sampaikan berapa yang disita dan sampaikan juga berapa total kerugian negaranya. Jangan sampai ada selisih besar yang tidak dijelaskan kepada publik.

Kenapa bisa terjadi selisih yang sangat jauh antara uang yang dikembalikan dengan kerugian negara?

Karena konstruksi hukum kita mengizinkan uang pengganti itu sebesar berapa yang mengalir kepada koruptor tersebut. Harusnya untuk keadilan, koruptor yang sudah divonis itu wajib mengembalikan total kerugian keuangan negaranya, bukan hanya aliran dana yang masuk ke kantongnya saja. Hakim dan jaksa sangat tahu persis soal ini.

Apa dampaknya jika publik tidak tahu nilai kerugian negara yang sebenarnya?

Masyarakat dan instansi seperti Kementerian Keuangan, *happy* saja menerima uang tersebut. Padahal, bisa jadi satu kasus kerugiannya mencapai Rp 8 triliun, tapi yang dikembalikan setelah sekian lama ditangani hanya sekian triliun. Itu terlalu sedikit sebenarnya, tapi karena tidak ada pembanding, publik menganggapnya sudah besar.

Lantas, menurut Anda, apakah pamer uang sitaan ini efektif memberikan efek jera karena dianggap akan memiskinkan koruptor?

Tidak. Karena kerugiannya sangat besar, sementara hakim memutuskan hanya mengembalikan sedikit, misal Rp15 miliar. Ini malah membuat koruptor senang. Mereka korupsi banyak, disuruh mengembalikan sedikit, lalu dinilai publik patuh hukum. Jadi tidak ada efek jera kalau perbandingannya seperti itu.

Artinya, penegak hukum wajib membuka data kerugian negara secara utuh saat rilis uang sitaan?

Iya, publikasi itu harus komprehensif. Publik harus tahu nilai sebenarnya agar bisa meminta pertanggungjawaban kepada penegak hukum. Jangan sampai informasi yang separtuh-

separuh ini menyisahkan.

Apa risiko terbesar jika informasi detail mengenai kerugian negara ini tidak disampaikan secara lengkap?

Akan terjadi dua hal. Pertama, *adverse selection problem*, dan kedua *moral hazard*. Pada *adverse selection*, bisa salah mengambil keputusan karena seakan-akan penegak hukum dan koruptor sudah menjadi palilawan karena mengembalikan uang, padahal itu bagian kecil saja. Kalau *moral hazard* itu semacam tipu-tipu. Masyarakat dan Presiden bisa saja ditipu seakan-akan hasilnya banyak, padahal kerugian negaranya jauh lebih raksasa.

Bukankah pamer uang ini sebagai bentuk transparansi agar publik tidak bertanya dikembalikan uang sitaan selama ini?

Itu konteks yang berbeda. Kalau barang bukti itu belum diputus hakim. Kalau uang pengganti ini kan sudah pernah hakim untuk diskusikan jaksa ke kas negara. Kalau mau benar-benar transparan, sampaikan seperti ini.

Kerugian negara sekian, yang berhasil kami tarik dan setor adalah sekian." Jadi kita punya pembanding. Kalau sekiranya kita tidak punya pembanding, jadi sulit mengukur keberhasilannya. ■ **www**

FOTO: ISTOCK/AMIRAN

FOTO: ISTOCK/AMIRAN